



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TABRANI**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **500136**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.415.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/160 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 11035 m²/105 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 50000 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 30000 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 270 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 40.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 168.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO/GT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BBP A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 199.139.359**F. HARTA LAINNYA** Rp. 69.500.000

Sub Total Rp. 1.866.139.359



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.866.139.359

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.